

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Oleh: Marthalina

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: marthalina88@gmail.com

ABSTRACT

Tangerang Regency has many potential natural resources and human resources that should be added value in increasing the economic potential of the community. However, the people's life in Tangerang district is still living in poverty. Looking at the facts in the field that there are still many people living in slums, the researchers need to conduct a study on how the role of local government in Tangerang District eradicate poverty in the region.

The research design refers to secondary data from 2011-2015. The research was conducted by qualitative method with descriptive inductive writing to obtain data. The scope of writing is about the role of Local Government of Tangerang Regency in Eradicating Poverty as well as factors that inhibit and support the role.

The results of this sresearch illustrates that the role of Local Government of Tangerang Regency in alleviating poverty is quite a lot of realized in 25 excellent programs that are implemented consistently cross-sectoral and cross-SKPD which is expected to solve synergic regional problems and integrated but the community is still constrained some access related to clean water facilities, especially in some densely populated areas or slums in coastal areas.

Keywords: *role, local government, poverty*

ABSTRAK

Kabupaten Tangerang memiliki banyak potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan potensi ekonomi masyarakatnya. Akan tetapi kondisi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tangerang saat ini masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Melihat fakta di lapangan yang masih terdapat banyak masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh, maka peneliti perlu melakukan sebuah kajian tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

Desain penelitian merujuk pada data sekunder dari tahun 2011-2015. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan penulisan deskriptif induktif untuk memperoleh data. Ruang lingkup penulisan yaitu mengenai peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam Mengentaskan Kemiskinan serta faktor yang menghambat dan mendukung peranan tersebut.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan sudah cukup banyak yang terealisasi dalam 25 program unggulan yang dilaksanakan

secara konsisten yang bersifat lintas sektor dan lintas SKPD yang diharapkan dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi akan tetapi masyarakat masih terkendala beberapa akses yang berkaitan dengan fasilitas air bersih terutama di beberapa kawasan padat penduduk atau kumuh di daerah peisir pantai.

Kata kunci: peran, pemerintah daerah, kemiskinan

PENDAHULUAN

Kabupaten Tangerang salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Banten diuntungkan dengan potensi fiskal yang memadai untuk memandirikan daerahnya. Kondisi geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Wilayah Kabupaten Tangerang dibagi atas daerah industri, daerah penyangga ibu kota, serta daerah yang juga memiliki pesisir pantai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang ini seharusnya dapat dikelola oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan data yang penulis akses pada <http://bantenku.com> pada 29 Maret 2017, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dari rentang tahun 2011-2015 tumbuh dengan angka rata-rata yang lebih tinggi dibanding Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten.

Tabel 1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang

No.	Pertumbuhan Ekonomi	Provinsi Banten	Kabupaten Tangerang
1.	2011	6.370%	6.555%
2.	2012	6.150%	6.063%
3.	2013	6.670%	6.470%
4.	2014	5.470%	5.940%
5.	2015	5.370%	5.390%

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah terutama dalam penyelenggaraan APBD terutama pengeluaran pemerintah. Rostow dalam Jhingan (2007)

menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas.

Sedangkan Wagner (dalam Mangkusubroto, 32:2006) mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wager menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*). Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jika pengeluaran pemerintah terlalu boros justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan pengeluaran pemerintah yang proporsional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dan diukur lebih jelas dalam struktur APBD di setiap pemerintah daerah.

Penyerapan APBD di Kabupaten Tangerang dari tahun 2011 hingga 2015 terus mengalami peningkatan yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai level 5,390% dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi sudah cukup tinggi akan tetapi di sisi lain kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Menurut Camat Neglasari, Ubaidillah Anshar dalam <http://www.bantenhits.com> yang penulis akses pada 29 Maret 2017 menyatakan bahwa:

Tabel 2
Realisasi APBD Kabupaten Tangerang

NO	REALISASI APBD	TAHUN (Dalam Miliar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	BELANJA DAERAH	2.027	2.709	3.278	3.513	3.807
	Belanja Pegawai	915	1.022	1.143	1.228	1.370
	Belanja Barang dan Jasa	499	520	820	846	636
	Belanja Modal	480	930	1.132	1.251	1.541
	Belanja Lain-Lain	136	237	183	186	260
2.	PENDAPATAN DAERAH	2.224	2.655	3.465	3.698	3,845
	PAD	665	840	1.218	1.576	1.468
	Dana Perimbangan	1.288	1.542	1.498	1.461	1.496
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	271	273	748	661	882
3.	PENYERAPAN APBD	91.142 %	DEFISIT	94.603%	94.997%	98.817%

Sumber: Tangerang Dalam Angka 2013, 2014, 2015 dan 2016

Kecamatan Neglasari mempunyai angka kemiskinan tertinggi dengan jumlah 111.000 jiwa penduduk dan 7.230 Kepala Keluarga (KK) masih dikategorikan sebagai warga miskin. Jumlah rakyat miskin di Neglasari lebih dari 60% berdasarkan data penerima bantuan beras untuk rakyat miskin. Selain itu, jumlah anak yatim di Kecamatan tersebut mencapai 730 orang dengan kondisi rumah kumuh 900 rumah, 125 di antaranya sudah direnovasi melalui program bedah rumah dan masih terdapat warga yang tidak punya jamban sekitar 300 orang.

Tabel 3
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (%)						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kab. Pandeglang	12.01	11.14	9.8	9.28	10.25	9.5	9.87
2.	Kab. Lebak	10.63	10.38	9.2	8.68	9.5	9.17	9.12
3.	Kab. Tangerang	6.55	7.18	6.42	5.71	5.78	5.26	5.13
4.	Kab. Serang	5.8	6.34	5.63	5.28	5.02	4.87	4.97
5.	Kota Tangerang	6.42	6.88	6.14	5.56	5.26	4.91	4.67
6.	Kota Cilegon	4.14	4.46	3.98	3.82	3.99	3.81	3.76
7.	Kota Serang	6.19	7.03	6.25	5.7	5.92	5.7	5.87
8.	Kota Tangerang Selatan	0	1.67	1.5	1.33	1.75	1.68	1.54
	Provinsi Banten	7.46	6.4675	6.885	6.115	5.67	5.9338	5.6125

Sumber: Tangerang Dalam Angka 2013, 2014, 2015 dan 2016

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu menempati urutan terbanyak berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Berdasarkan data yang diakses penulis pada <http://www.infonawacita.com> pada 29 Maret 2017, bahwa:

Provinsi Banten memiliki 3,1 juta penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan. Rata-rata penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan bermukim di kawasan pesisir terutama Kecamatan Kosambi di perbatasan dengan DKI Jakarta hingga ke Kecamatan Kronjo yang berbatasan dengan Kabupaten Serang. Mayoritas mata pencarian penduduk miskin adalah berupa nelayan dan petani penggarap sawah maupun tambak milik orang lain.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kab. Pandeglang	140.28	127.8	117.6	109.1	121.1	113.1	121.7
2.	Kab. Lebak	142.23	125.2	115.2	106.9	118.6	115.8	116.87
3.	Kab. Tangerang	256.15	205.1	188.6	176	183.9	173.1	182.64
4.	Kab. Serang	82.9	89.2	82	76.1	72.8	71.4	72.1
5.	Kota Tangerang	106.1	124.3	114.3	106.5	103.1	98.8	99.43
6.	Kota Cilegon	15.37	16.8	15.4	15	15.9	15.5	15.2
7.	Kota Serang	32.76	40.7	37.4	34.7	36.7	36.2	36.35
8.	Kota Tangerang Selatan	-	21.92	20.1	18.7	25.4	25.3	25.1
Provinsi Banten		775.79	751	690.9	642.9	677.5	649.2	690.67

Sumber: Tangerang Dalam Angka 2013, 2014, 2015 dan 2016

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah apa peran pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

TINJAUAN PUSTAKA

PERANAN

Menurut Robbins (2009:362) adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan dikaitkan erat dengan seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Sedangkan menurut Soekanto (2012:213) menjelaskan lebih lanjut bahwa cakupan yang terdapat pada peranan adalah sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Dapat juga diartikan bahwa serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu yang terdapat di dalam masyarakat dalam suatu bentuk wadah organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang ada dan sangat penting bagi struktur sosial yang ada dalam masyarakat dimana seseorang itu berada.

Ndraha (2003:111) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah aspek dinamis lembaga atau peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga. Sedangkan Soerjono Soekanto (2012: 212) menambahkan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan, peranan dapat berlaku sebagai status, status yang dimaksud adalah sebagai berikut:

"Status merupakan tempat atau posisi seseorang dalam arti pergaulannya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Demikian juga dalam bukunya, Marwansyah (2012:18) mengemukakan bahwa:

Sebagai penyedia layanan/jasa, profesional sumber daya manusia dituntut menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberi informasi bagi sejumlah konstituen, mulai dari lembaga pemerintah sampai calon pekerja dan manajemen senior. Dalam perannya sebagai

pengendali, praktisi sumber daya manusia diharapkan untuk dapat menegakkan kebijakan dan memastikan kepatutan atas berbagai ketentuan peraturan pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Armstrong dalam Marwansyah (2012:18) mengatakan bahwa peran fungsi sumber daya manusia adalah ikut memfasilitasi organisasi mencapai tujuan-tujuan dengan mengambil prakarsa dan memberikan pedoman dan dukungan atas semua persoalan yang terkait dengan para karyawan. Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa peranan adalah suatu sikap yang berhubungan dengan posisi atau tempat yang berkaitan dengan pemegang tanggungjawab sebagai seorang pimpinan dalam terjadinya hal atau peristiwa yang bertumpu pada tekanan kewibawaan, kharisma, dan kepribadian unggul seseorang sehingga layak mendapatkan kepatuhan bawahan. Dengan kata lain, peranan merupakan sebuah sikap yang dapat mawadahi dan mewujudkan harapan yang diinginkan dari individu atau kelompok agar melakukan sesuatu yang dihasilkan berguna bagi kepentingan bersama.

KEMISKINAN

Setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya.

Kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995:176). Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian,

standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Menurut (Nugroho, 1995:179) Kemiskinan adalah:

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup.

Sedangkan menurut (Suryawati, 2004:114) kemiskinan adalah:

Standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan 22 negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi

Tabel 5
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (persen)						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kab. Pandeglang	12.01	11.14	9.8	9.28	10.25	9.5	9.87
2.	Kab. Lebak	10.63	10.38	9.2	8.68	9.5	9.17	9.12
3.	Kab. Tangerang	6.55	7.18	6.42	5.71	5.78	5.26	5.13
4.	Kab. Serang	5.8	6.34	5.63	5.28	5.02	4.87	4.97
5.	Kota Tangerang	6.42	6.88	6.14	5.56	5.26	4.91	4.67
6.	Kota Cilegon	4.14	4.46	3.98	3.82	3.99	3.81	3.76
7.	Kota Serang	6.19	7.03	6.25	5.7	5.92	5.7	5.87
8.	Kota Tangerang Selatan	-	1.67	1.5	1.33	1.75	1.68	1.54
Provinsi Banten		7.46	6.4675	6.885	6.115	5.67	5.9338	5.6125

Sumber: Tangerang Dalam Angka 2013, 2014, 2015 dan 2016

telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Harahap (2006:37) Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan tahun 2004 menerangkan

pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dapat dilihat angka kemiskinan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Menurut Suryawati (2004:118) berdasarkan kondisi kemiskinan terdapat empat bentuk kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan Absolut.

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan,

dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau 30 mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. **Kemiskinan Relatif.**

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. **Kemiskinan Kultural.**

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. **Kemiskinan Struktural.**

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. 31 Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu

sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia.

Setelah bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah (Suryawati, 2004:120):.

1. **Kemiskinan Alamiah.**

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2. **Kemiskinan Buatan.**

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah (Suryawati, 2004:122):

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai;
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah;
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur;
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*);
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Faktor-faktor tersebut menurut Saleh (2002: 88-89) merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut.

- **Pertama**, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat.

Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hubungannya terhadap tingkat kemiskinan adalah PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terutama kebutuhan-kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek kemampuan pendapatan, akan tetapi juga berkenaan dengan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah (Todaro, 1997).

- **Kedua**, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Pengeluaran pemerintah menurut (Saleh, 2002:92) adalah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah. Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin

tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

- **Ketiga**, angka melek huruf (AMH). Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004:119). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- **Keempat**, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih. Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006:39). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.
- **Kelima**, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2002:162). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit

atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.

Berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin tersebut, maka diharapkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam hal pengeluaran pemerintah yang menurut (Saleh, 2002:116) adalah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah. Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah. Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah. Pemerintah daerah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian di daerah merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan

ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan menurut Sugiono (2012:2). Silalahi (2012:180) mengatakan bahwa desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

Bersarkan penjelasan di atas maka peneliti akan lebih menitikberatkan pada desain penelitian dengan dimensi waktu dengan data sekunder yang berdasarkan data berkala (*time series*) berupa data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Desain penelitian merujuk pada data sekunder dari tahun 2011-2015. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan penulisan deskriptif induktif untuk memperoleh data. Ruang lingkup penulisan yaitu mengenai peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam Mengentaskan Kemiskinan serta faktor yang menghambat dan mendukung peranan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah apasaja peran Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

PEMBAHASAN

Kabupaten Tangerang yang terbentuk pada 27 Desember 1943. Meski sempat terpecah menjadi Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang tetap menjadi rujukan para pengusaha yang mendirikan perusahaan. Banyaknya jumlah perusahaan di Tangerang juga berimplikasi pada banyaknya masyarakat di wilayah tersebut. Tercatat pada 2015 ada lebih dari 3,1 juta orang yang tinggal di 29 kecamatan.

Berdasarkan data yang penulis akses pada <http://www.jawapos.com> pada 17 April 2018 dapat diketahui bahwa persentase rata-rata warga miskin di Kabupaten Tangerang adalah 5.25 persen dari tahun 2009 sampai dengan 2015. Tugas Pemerintah Daerah

Kabupaten Tangerang memang tidak mudah karena banyak kawasan yang padat, kumuh, dan miskin. Pada 2014 Bupati Kabupaten Tangerang meluncurkan program Gebrak Pakumis yaitu Gerakan Bersama Rakyat Atasi Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin. Ada tiga tipologi kawasan permukiman penduduk di Kabupaten Tangerang yang akan disasar dalam program Gebrak Pakumis ini, yaitu kawasan nelayan pesisir di bagian utara, kawasan pertanian, serta perkotaan dan industri. Semuanya memiliki kesamaan. Yakni, memiliki sanitasi yang buruk dan kualitas rumah yang tidak layak. Tercatat pada 2015 ada 407 kawasan padat, kumuh, dan miskin. Terdapat 13.950 keluarga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Sementara itu, 81.440 kualitas bangunan rumah masih tidak permanen. Serta, 5.283 keluarga tinggal di bantaran sungai, situ, dan sempadan pantai.

Proyek percontohan dari Gebrak Pakumis dilaksanakan di Kampung Rawa Saban pada 2011. Pada 2012 program itu dilanjutkan dengan membedah 1.000 unit rumah di lima kawasan kumuh yang penduduknya berpenghasilan rendah serta memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana agar memiliki ketahanan ekonomi kawasan tersebut dibangun dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. Sumber program Gebrak Pakumis berasal dari APBD maupun pendanaan lain. Program tersebut juga ditawarkan kepada sejumlah perusahaan yang berminat untuk menyalurkan dana *corporate social responsibility*(CSR) dengan cara datang ke Kantor Bappeda Kabupaten Tangerang.

Target program itu adalah peningkatan kualitas perumahan dan permukiman untuk kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Tangerang beserta penyediaan bagi lebih dari 20 kawasan Pakumis setiap tahun. Jumlah anggaran dan unit yang diperbaiki semakin bertambah setiap tahun. Pada 2011 program tersebut memperbaiki 50 unit rumah di Kampung Rawa Saban, Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji dengan anggaran Rp 500 juta. Kemudian pada 2012, dilakukan pembangunan secara dua tahap.

Total yang ditangani sekitar 1.052 unit dengan anggaran Rp 8 miliar. Pada 2013 ada 800 unit yang ditangani di 29 kawasan di 13 kecamatan dengan anggaran Rp 8 miliar. Kemudian pada 2014, anggaran di tingkatkan menjadi Rp 14 miliar untuk 1.041 unit di 29 kawasan di sembilan kecamatan. Sementara itu, pada 2015 sudah dianggarkan Rp 14 miliar untuk memperbaiki 1.000 unit di 28 kawasan di 10 kecamatan. "Total ada Rp 44,5 miliar yang sudah dikeluarkan untuk program ini.

Berdasarkan data yang penulis akses pada <https://tangerangkab.go.id/menu-konten/show-berita/1> pada 17 April 2018 diketahui bahwa selain Gebrak Pakumis, Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan program unggulan sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian visi misi yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategik yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Pada 2018 Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan mengawal serta melaksanakan 25 (dua puluh lima) program unggulan sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas SKPD yang diharapkan dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. SKPD terkait dengan menggandeng swasta maupun kelompok masyarakat secara konsisten bersama-sama melalui perencanaan yang matang diharapkan dapat mewujudkan tujuan program ini. 25 Program Unggulan Kabupaten Tangerang adalah:

1. Peningkatan Akses Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Perluasan pemenuhan hak dan

kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu di antaranya pemenuhan akses pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi fokus utama dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang. Salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan akses pendidikan adalah pembangunan ruang kelas terutama untuk sekolah menumpang dan sekolah yang masih membutuhkan ruang kelas baru.

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi standar standar pelayanan minimal khususnya pemenuhan target indikator rasio murid per kelas di Kabupaten Tangerang. Untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya telah menggunakan berbagai sumber anggaran keuangan, baik dari APBD Kabupaten Tangerang maupun bersumber dari APBN dalam bentuk dana alokasi khusus dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Agama dalam bentuk pembangunan sekolah Madrasah di Kabupaten Tangerang dan sumber pendanaan lainnya dengan dibantu oleh berbagai yayasan pengelola sekolah dalam pencapaian targetnya.

2. Peningkatan Sarana Kesehatan

Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas serta peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap menjadi salah satu upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2018 ditargetkan 8 Puskesmas di tingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menargetkan beroperasinya RSUD Pantura untuk menangani masyarakat Kabupaten Tangerang di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Sarana dan prasarana kesehatan saat ini terkonsentrasi di wilayah tengah dan wilayah selatan Kabupaten Tangerang, sedangkan di wilayah utara masih kurang dalam akses kesehatan. Hal tersebut perlu segera ditangani untuk memberikan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah utara. Oleh karena ini Pemerintah Kabupaten

Tangerang mencanangkan program unggulan berupa pembangunan RSUD di wilayah utara. Pemenuhan standar Rumah Sakit tipe B Pendidikan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang dan Standar Rumah Sakit Tipe B untuk Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja terus diupayakan dengan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit secara bertahap. SKPD yang terkait dalam program ini di antaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah dan Dinas Cipta Karya.

3. Kartu Pintar

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki inisiatif untuk menerbitkan kartu pintar untuk membuka akses layanan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Program yang mendukung Kartu Pintar yaitu Program Manajemen pelayanan pendidikan yang dilaksanakan dengan melalui penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu. Diharapkan pada akhir masa RPJMD dapat membuka akses layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh siswa MBR Kabupaten Tangerang. Pihak yang terkait dalam mengawal terwujudnya penerbitan dan penerapan kartu pintar ini antara lain Dinas Pendidikan, BAPPEDA sebagai lembaga yang memfasilitasi koordinasi instansi terkait dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pendukung yang turut mensukseskan program ini.

4. Kartu Sehat

Kartu sehat dikembangkan sebagai media yang dapat memberi kemudahan akses layanan kesehatan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan dengan adanya program kartu sehat semua lapisan masyarakat Kabupaten Tangerang dapat menikmati layanan kesehatan yang ada. Kartu Sehat didukung dengan program upaya kesehatan masyarakat melalui penyusunan database penduduk penerima kartu sehat, penyusunan regulasi, sosialisasi mekanisme pelaksanaan program kartu sehat dan penerapan kartu sehat, sejak tahun 2013

penerapan kartu sehat ini dapat membuka akses layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terjamin pembiayaan kesehatannya di Kabupaten Tangerang. Pihak yang terkait langsung dalam program ini antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesejahteraan Sosial, Kecamatan dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah lainnya sebagai rumah sakit rujukan.

5. Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang. Pengembangan pasar sebagai pusat perekonomian dirasakan besar manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tangerang bermaksud meningkatkan kualitas pelayanan pasar melalui revitalisasi pasar dengan langkah-langkah konkret yaitu memetakan kembali kondisi pasar yang ada, mengevaluasi kinerja rancangan pasar tradisional, menyusun sebuah model dan prototipe rancangan, merumuskan perancangan revitalisasi pasar tradisional sebagai sebuah “pasar modern”. Pihak yang terkait langsung dalam program ini antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya.

6. Gebrak Sipintar (Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Terpadu)

Pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pendekatan yang dicanangkan dalam Program Gebrak Sipintar. Gerakan Berantas Kemiskinan melalui Simpan Pinjam Terpadu ini memberikan stimulasi bagi yang benar-benar membutuhkan tanpa agunan. Program yang menjadi bagian dari program gebrak sipintar yaitu program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil

menengah melalui penguatan pembiayaan usaha bagi UMKM dan penyediaan infrastruktur pendukung. Diharapkan pada akhir periode RPJMD sebanyak 32.000 UMKM dapat di tingkatkan produk dan mutunya melalui penyertaan modal pada Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB). Pihak yang terkait dalam program ini antara lain Dinas KUMKM dan lembaga-lembaga keuangan.

7. Jalin Rasa (Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera)

Saat ini setiap perusahaan didorong untuk berperan serta dalam pembangunan kemasyarakatan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar pihak dapat di tingkatkan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kredibilitas pihak yang menjalin kerjasama. Kerjasama ini ditargetkan sebanyak 10 kerjasama pertahun, sehingga pada 2018 di targetkan terdapat 40 kerjasama. Program yang terkait dengan Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera adalah program kerjasama pembangunan melalui pembentukan tim pengendali program TLSP. Pihak yang mendukung program ini antara lain BAPPEDA dan Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah.

8. Penanganan Pengangguran

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membangun BLKI atau Balai Latihan Kerja Industri yang terpusat dan terpadu skala Kabupaten merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja. Ditunjang teknologi yang memadai dan pendidik yang kompeten diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai. Program yang terkait dengan pembangunan Balai Latihan Kerja Industri ini adalah program pembangunan gedung pemerintahan, program penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik konstruksi dan pengadaan sarana pengadaan lahan dan pengoperasian BLKI. Sarana dan prasarana diharapkan dapat dilengkapi pada 2015 sehingga dapat segera difungsikan karena pembangunannya sudah mulai dibangun pada 2013. Pihak yang terkait dalam program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

9. Peningkatan Akses Sanitasi

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki fokus dalam meningkatkan akses sanitasi dan air minum masyarakat meliputi sektor penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase dan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu dari wujud program ini adalah program **Sanitasi Berbasis Sekolah** atau Sanisek yang dimaksudkan untuk meningkatkan layanan sanitasi bagi siswa tingkat dasar. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemberdayaan sanitasi komunitas sekolah dan pembangunan MCK di sekolah yang benar-benar membutuhkan dengan jumlah 250 MCK per tahun. Dengan program ini diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat menyediakan 1.269 unit MCK untuk komunitas sekolah sehingga dapat menikmati layanan sanitasi yang layak dan secara bersama-sama memelihara sarana sanitasi yang disediakan Pemerintah Daerah.

Selain akses sanitasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mencanangkan program **Seribu Sanitasi** (Serasi) untuk masyarakat. Target program ini adalah menyediakan 1000 sarana sanitasi kepada masyarakat setiap tahun. Sehingga pada akhir RPJMD dapat tercapai 3.000 sarana sanitasi masyarakat. Program ini didukung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah. Adapun pihak yang turut dalam pelaksanaan program ini antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya dan Dinas Kesehatan.

10. Pembangunan Sport Centre

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari semakin meningkatnya kualitas infrastruktur yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi maupun pengembangan wilayah. Pada sisi lainnya Pemerintah Daerah pun perlu memikirkan ketersediaan sarana publik yang mampu mewadahi segala aktifitas keolahragaan. Sport centre dengan skala Kabupaten sudah mulai terbangun, hanya kelengkapan venuenya masih belum memadai, sehingga mulai tahun 2014 dibangun venue sebagai bagian dari *Sport Centre*. Program yang menjadi bagian dari Pembangunan Sport Centre ini adalah program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui pengadaan lahan, pembangunan fisik konstruksi dan pengadaan sarana, penyusunan *feasibility study* dan penyusunan DED hingga pengoperasionalan sport centre. SKPD yang terkait dengan Program ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Cipta Karya dan Setda Bagian Pertanahan.

11. Pengembangan Pusat Seni Budaya dan Pariwisata

Pengembangan komoditas *icon* Kabupaten Tangerang seperti Rambutan Parakan dan Ayam Wareng harus terus mendapat perhatian karena merupakan potensi bagi Kabupaten Tangerang. Selain itu pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan pembangunan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang telah ditetapkan yaitu Kawasan Wisata Solear dan Tanjung Pasir. SKPD terkait dalam program ini antara lain Disporabudpar, Dinas Cipta Karya serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

12. GEMARIPAH (Gerakan Masyarakat Mandiri Sampah)

Program pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) merupakan sarana yang dapat menanggulangi tingginya timbulan dengan menerapkan konsep

3R (Reduce, Reuse, Recycle). Program terkait Pembangunan MRF (*Material Recovery Facilities*) di setiap Kecamatan adalah program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyusunan database, pemberdayaan dan pembentukan kelompok masyarakat pengelola TPST dan penyediaan infrastruktur TPST. Pembangunan TPST ditargetkan mulai dibangun pada 2014 sebanyak 5 unit, dan kedepannya dibangun 5 unit per tahun sehingga pada akhir RPJMD terbangun 15 unit TPST. Mengurangi sampah dari hulu guna mengurangi beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menjadi sasaran program ini. Program ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, rencananya pada tiap kecamatan akan disediakan TPST yang secara langsung dikelola masyarakat dengan monitoring dan evaluasi dari SKPD terkait. Pihak yang terlibat dalam program ini antara lain BAPPEDA, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BLHD, dan Kelompok Masyarakat pemberdaya dan pengelola sampah.

13. Peningkatan Layanan Air Bersih

Bencana banjir dan kekurangan air bersih dan sumber air baku menjadi permasalahan yang ironi di Kabupaten Tangerang. Ketika musim penghujan turun banjir kerap melanda wilayah Kabupaten Tangerang, namun pada musim kemarau beberapa wilayah kekurangan air. Sebagai upaya dalam memadupadankan kedua permasalahan tersebut agar berbuah manfaat, maka dicanangkan program pembangunan embung atau tandon air. Pada musim hujan tiba ketika volume air melimpah ruah, embung menjadi wadah untuk menampung luapan air tersebut sehingga dapat mengurangi atau bahkan mananggulangi area banjir. Pada musim kemarau diharapkan simpanan air tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun air baku untuk PDAM Tirta Kerta Raharja. Apabila dikembangkan secara maksimal, bukan tidak mungkin embung juga dapat memenuhi kebutuhan air industri yang marak berkembang di Kabupaten Tangerang. Pada 2018 ditargetkan telah dibangun embung di Kecamatan Solear. Program yang terkait

dengan Pembangunan Embung/tandon air ini adalah program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya melalui penyusunan Feasibility Study, Penyusunan DED, Pembangunan Fisik Konstruksi dan Pengadaan Sarana dan operasionalisasi embung/tandon. Pihak yang menjadi ujung tombak dalam program ini antara lain Dinas Bina Marga dan SDA dan Sekretariat Daerah.

14. Kantor Bersama Bidang Keagamaan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, perlu di tingkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang menampung segala aktifitas berbagai organisasi kemasyarakatan dibidang keagamaan seperti MUI, LPTQ, Bazda, KUA dan lain sebagainya dengan mendirikan Kantor Bersama Bidang Keagamaan baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Pembangunan Kantor Bersama tersebut juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang keagamaan. Pada 2018 ditargetkan telah terbangunnya 6 unit Kantor Bersama Bidang Keagamaan di Kecamatan dan 1 unit Kantor Bersama Bidang Keagamaan di tingkat Kabupaten. SKPD yang terkait dengan program ini adalah Dinas Cipta Karya dan Kecamatan.

15. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Dalam upaya meningkatkan jaringan infrastruktur jalan dan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru perlu dilakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Program yang mendukung adalah Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatannya penyusunan RDTR dan peraturan zonasi serta Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan investasi ke Kabupaten Tangerang. Pihak yang turut serta dalam pelaksanaan program ini adalah BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, BPMPSTP, dan Sekretariat Daerah.

16. Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin)

Program ini diselenggarakan untuk menangani permasalahan umum yang terdapat di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Tangerang seperti rumah tidak layak huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan. Fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh, sehingga pada akhir periode RPJMD dapat teratasi 27 kawasan melalui dana hibah. Program yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan berupa pelaksanaan penyusunan database, pelatihan pengelola program stimulan dan penyaluran dana stimulan pada pengelola program. Adapun SKPD yang diharapkan dapat secara langsung menangani program ini antara lain BPKAD, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional. Selain SKPD yang terlibat dalam program ini adalah kelompok masyarakat yang bertugas sebagai pemberdaya sekaligus sebagai pelaksana dan lembaga swasta yang terkait di bidang air minum dan sanitasi seperti IUWASH.

17. Gerbang Mapan

Program Gerbang Mapan ini atau Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Tangerang agar siap menyongsong pembangunan kawasan reklamasi pantai utara yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi wilayah pantai utara yang didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi alasan peluncuran program ini. Selain pengembangan infrastruktur juga turut didukung dengan pengembangan ekonomi masyarakat secara

merata. Program yang dilaksanakan dalam mendukung program gerbang mapan ini adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan berupa penyusunan grand design, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyediaan infrastruktur pendukung pada 25 Desa Pesisir. Adapun pihak yang terkait dalam program ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan.

18. E-Government

Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain pengembangan untuk siklus perencanaan pembangunan, program ini juga menggarap pengembangan sistem informasi pada tiap pelayanan publik yang ada. Pada 2014 ditargetkan seluruh SKPD di Kabupaten Tangerang tersambung kedalam satu jaringan sistem informasi berbasis web dengan media fiber optik, dan pada 2018 seluruh SKPD ditargetkan sudah dapat tersambung. Pengembangan sistem tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator terselenggaranya tatakelola pemerintahan dengan grade *good governance*. Program ini didukung dengan program pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan penyusunan serta pengembangan SIM pelayanan publik. Pihak yang terlibat dalam program ini adalah seluruh SKPD, dengan leading sektornya Dinas Komunikasi dan Informatika.

19. Desa Mantap (Mandiri Tahan Pangan)

Program desa mandiri pangan ini dirancang dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kapasitasnya untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat pedesaan dengan fokus utama adalah rumah tangga pedesaan. Pengembangan desa mandiri pangan sebagai upaya mengintegrasikan

dan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam suatu desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan tercapai desa yang memiliki ketahanan pangan mantap dan tidak terjadi kerawanan pangan. Melalui program desa mandiri pangan ini, selain pemberian modal kepada petani/masyarakat, juga disertai dengan penyuluhan, pembinaan, pelatihan, bimbingan dan pengorganisasian, perbaikan sarana dan prasarana desa, dan bimbingan teknologi, sehingga kelompok masyarakat tersebut mampu mandiri dalam pengelolaan usaha-usaha produktif di wilayahnya. SKPD penanggung jawab program ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

20. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa alokasi Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan adalah 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Untuk mewujudkan hal itu Pemda Kab. Tangerang menyelenggarakan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan salah satu langkah nyata dalam memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia. Hal ini untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan komprehensif dalam mewujudkan komunitas hijau. SKPD yang terkait dalam program ini adalah Dinas Tata Ruang, BAPPEDA, BLHD, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Setda Bagian Pertanahan, DKP dan Kantor Pemakaman Daerah.

21. Akselerasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Angka tersebut pada kedepan dapat dinaikkan dengan progresif mengingat tingginya potensi PAD Kabupaten Tangerang di antaranya yaitu dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah Bangunan

(BPHTB), pajak Restoran, PJU, pajak hotel, pajak parkir, pajak Reklame dan pajak hiburan. Potensi lain yang belum tergalai adalah pajak air bawah tanah yang saat ini penggunaannya kurang terkendali. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun saat ini sangat berpotensi untuk ditingkatkan karena mulai tahun 2014 dikelola oleh Kabupaten Tangerang. Sehingga diharapkan dapat terus meningkat untuk mendukung jalannya pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. SKPD yang bertanggung jawab langsung dalam program ini adalah Dinas Pendapatan Daerah, BPMPTSP, Disperindag, DKP dan SKPD lainnya yang bertugas dalam pemungutan retribusi.

22. Penanggulangan Banjir

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa wilayah banjir yang diakibatkan oleh luapan air sungai di antaranya yaitu disekitar daerah aliran sungai wilayah Sungai Cisadane menggenangi (5 Kecamatan) yaitu Kec. Curug, Legok, Sepatan, Pakuhaji, Teluknaga; Sungai Cirarab menggenangi (4 Kecamatan) yaitu Kec. Legok, Curug, Cikupa dan Pasar Kemis, Sungai Cimanceuri menggenangi (5 Kecamatan) yaitu Kec. Legok, Tigaraksa, Cikupa, Balaraja dan Kronjo dan Sungai Cidurian menggenangi (3 Kecamatan) yaitu Kec. Cisoka, Jayanti, Kresek. Berdasarkan fakta tersebut pada beberapa tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan Program penanggulangan banjir guna mengurangi titik banjir agar tidak merugikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berdomisili di wilayah banjir tersebut Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, normalisasi saluran sungai dan normalisasi saluran pembuang. Adapun SKPD yang mendukung program ini adalah Dinas Bina Marga dan SDA.

23. Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas

Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki banyak titik kemacetan terutama pada koridor Jalan Raya Serang,

Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga60Dadap – Kamal, Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan Raya Pasar Kemis. Sejauh ini lintasan yang paling macet adalah Lintasan Cikupa dan Dadap, maka perlu penanganan jalan atau pembukaan akses. Untuk itu diperlukan kebijakan terpadu dalam penanggulangan kemacetan seperti Pembukaan Jalur Baru, Penertiban pasar/PKL di badan jalan utama, pemeliharaan baik rutin maupun berkala (periodik) jalan penghubung Peningkatan, dan pembangunan/relokasi koridor kemacetan serta rekayasa lalu lintas yang komprehensif. SKPD yang bertanggung jawab dalam program ini di antaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, BAPPEDA, Bagian Pertanahan, BPMPTSP dan Dinas Tata Ruang

24. Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pemerintah Daerah perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah. Sementara itu itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian masih rendah, karena belum adanya suatu aturan baku yang dapat memayungi seluruh upaya pengendalian yang dilakukan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada. Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu dilakukan melalui penetapan lahan dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian Pengawasan Perlindungan, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan serta Ketentuan Pidana dalam hal terjadi penyimpangan pemamfaatan lahan. SKPD yang secara langsung terkait dengan program ini adalah Dinas Pertanian Peteranakan dan Ketahanan Pangan, Dinas

Tata Ruang, dan BAPPEDA.

25. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan reformasi pelayanan di tingkat kecamatan. Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan kepada pemerintah desa/kelurahan. Upaya menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan ini dapat dilakukan dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan. Fungsi sebagai pusat pelayanan ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan banyak program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, berdasarkan data yang diakses penulis pada <http://banten.bisnis.com> pada 17 April 2018 bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menilai beberapa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih tidak saling terintegrasi. Hal inilah yang menjadi faktor dibalik lambatnya penurunan angka kemiskinan di wilayah ini. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Banten mencapai 658.110 orang pada Maret 2016 atau turun dari periode Maret 2015 sebanyak 702.400 orang. Selang periode Maret 2011-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Banten cukup berfluktuasi. Berdasarkan informasi dari Kepala BPS Banten Agoes Soebeno:

“Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Banten sangat bergantung terhadap laju inflasi di kawasan ini. Dalam beberapa waktu terakhir, inflasi terpantau stabil sehingga hal tersebut berkorelasi positif terhadap angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada September 2013 sempat melonjak tinggi hingga 3,86%

dibandingkan Maret 2013 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Setelah itu, pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin sempat mengalami penurunan mencapai 622.840 orang dan kembali naik pada September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. Sejak saat itu, angka kemiskinan konsisten mengalami penurunan. Melihat korelasinya dengan laju inflasi, peran komoditi makanan cukup signifikan dibandingkan komoditi nonmakanan terhadap fluktuasi jumlah penduduk miskin di Banten. Sebagaimana diketahui, angka inflasi di Banten masih bergantung terhadap komoditas makanan, terutama *volatile foods*.”

Jika melihat dari data yang ada, sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dapat menjadikan itu sebagai acuan. Tetapi yang saya lihat, tiap pemda memiliki programnya masing-masing sehingga tidak ada benang merah atau integrasi dengan daerah lainnya. Selama ini, penurunan jumlah penduduk miskin di Banten pada Maret 2016 lebih banyak dipengaruhi oleh musim panen sehingga nilai tukar petani (NTP) menjadi naik. Untuk September mendatang, ada kemungkinan angkanya akan naik karena terkena lebaran dan tahun ajaran baru. Menurut Kuncoro (2003:72) yang menyatakan bahwa:

“strategi alokasi anggaran dalam hal ini pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional.”

Pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang belum secara langsung memiliki dampak terhadap kemiskinan. Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah.

Pada kenyataannya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu menempati urutan terbanyak berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten meskipun pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk pembangunan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis Provinsi Banten memiliki 3,1 juta penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan. Rata-rata penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan bermukim di kawasan pesisir terutama Kecamatan Kosambi di perbatasan dengan DKI Jakarta hingga ke Kecamatan Kronjo yang berbatasan dengan Kabupaten Serang. Mayoritas mata pencarian penduduk miskin adalah berupa nelayan dan petani penggarap sawah maupun tambak milik orang lain.

Menurut Camat Neglasari, Ubaidillah Anshar Kecamatan Neglasari mempunyai angka kemiskinan tertinggi dengan jumlah 111.000 jiwa penduduk dan 7.230 Kepala Keluarga (KK) masih dikategorikan sebagai warga miskin. Jumlah rakyat miskin di Neglasari lebih dari 60% berdasarkan data penerima bantuan beras untuk rakyat miskin. Selain itu, jumlah anak yatim di Kecamatan tersebut mencapai 730 orang dengan kondisi rumah kumuh 900 rumah, 125 di antaranya sudah direnovasi melalui program bedah rumah dan masih terdapat warga yang tidak punya jamban sekitar 300 orang. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal kepada Pemerintah Daerah telah menimbulkan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan-kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Kebijakan-kebijakan fiskal yang disusun oleh Pemerintah Daerah merupakan perwujudan dari pendapatan dan belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD bertujuan membangun segala aspek termasuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan lewat program-program yang menekan angka-angka kemiskinan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebagai regulator

sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian di daerah merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan memang secara langsung tidak dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah. Diperlukan variabel atau unsur penunjang lain agar kemiskinan tersebut dapat ditekan. Salah satunya adalah melalui sektor pendidikan yang ditunjang dengan berbagai program pendidikan Pemerintah Daerah, adanya belanja pegawai, belanja pembangunan, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Dengan meningkatnya belanja pegawai, belanja pembangunan, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya maka diharapkan geliat perekonomian di tingkat masyarakat dapat meningkat, banyaknya pihak investor dan calon investor serta tumbuhnya UMKM yang berdampak kepada terbukanya lapangan pekerjaan baru, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.

PEMBANGUNAN

Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dianggap berdampak secara langsung terhadap variabel kemiskinan hanya sebesar 23,662 % dengan persentase terbesar berasal subvariabel pengeluaran pemerintah untuk pembangunan yang dilaksanakan dalam urusan pekerjaan umum yaitu sebesar 14,1354 %.

• Program Pekerjaan Umum

1. Perencanaan pembangunan jalan
2. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Daerah
3. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kabupaten
4. Perencanaan pembangunan jembatan
5. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang

6. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Desa
 7. Pengendalian Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Wilayah Utara
 8. Pengendalian Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Wilayah Selatan
 9. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 10. Belanja Modal Rehab/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan
 11. Program Pembangunan turap/talud/brojong
 12. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 13. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 14. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 15. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
 16. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
 17. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda Empat Survey Perencanaan dan Pemeliharaan Jalan
 18. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Ukur
 19. Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung
 20. Belanja Modal Alat Ukur Jalan dan Jembatan
 21. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
 22. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
 23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
 24. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
 25. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 26. Program pengendalian banjir
 27. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
 28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Alur Sungai
 29. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
 30. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 31. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa
 32. Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Irigasi/MCK/SPAL Pedesaan (APBD-P)
- **Angka Melek Huruf (Wajib Belajar Sembilan Tahun)**

Persentase terbesar kedua pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dianggap berdampak secara langsung terhadap variable kemiskinan adalah subvariabel angka melek huruf yang dilaksanakan dalam program wajib belajar sembilan tahun sebesar 7,238%. Program wajib belajar Sembilan tahun berupa:

 1. Penambahan ruang guru sekolah
 2. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
 3. Pembangunan MCK
 4. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
 5. Portable Digital Dab Multimedia Interaktif SMP
 6. Pengadaan mebeluer sekolah
 7. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
 8. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
 9. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
 10. Pelatihan penyusunan kurikulum
 11. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
 12. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN/MIN dan SMPN/MTSN
 13. Penyelenggraan paket A setara SD dan B setara SMP
 14. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
 15. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

16. Penyelenggaraan akreditasi SD, SMP, SMA

- **Angka Melek Huruf (Pendidikan Anak Usia Dini)**

Persentase terbesar ketiga pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dianggap berdampak secara langsung terhadap variable kemiskinan adalah subvariabel angka melek huruf yang dilaksanakan dalam program pemerintah daerah berupa pendidikan anak usia dini sebesar 1,6866%. Program pendidikan anak usia dini berupa:

1. Pembangunan gedung sekolah
2. Pembangunan PAUD.
3. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
4. Pengembangan pendidikan anak usia dini
5. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

- **Fasilitas Kesehatan (Sarana Kesehatan)**

Persentase terbesar keempat pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dianggap berdampak secara langsung terhadap variable kemiskinan adalah subvariabel fasilitas kesehatan masyarakat berupa pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dengan penambahan jumlah tenaga medis sebesar 0,373%.

Tabel 6

Jumlah Tenaga Medis, Paramedis Perawatan, Paramedis Non Perawatan dan Tenaga Non Medis Kabupaten Tangerang Tahun 2016

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Tenaga Medis/ <i>Medical Personnels</i>	
	Dokter Ahli/ <i>Specialist</i>	69
	Dokter Umum/ <i>General Practitioners</i>	37
	Dokter Gigi./ <i>Dentist</i>	4
	Dokter Gigi Spesialis. / <i>. Dental Specialist</i>	4
	Dokter Konsultan/ <i>Consultant Physician</i>	15
	Dokter/Dokter Gigi S2/Kes. Masyarakat/	5
	Dokter Gigi MHA/MARS/ <i>public health</i>	-

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
2	Paramedis Perawatan	
	D IV Kebidanan/ <i>Midwifery</i>	12
	Sarjana Keperawatan/ <i>Scholar nursing</i>	68
	Akademi Keperawatan/Penata Rawat	443
	Akademi Kebidanan/ <i>Midwifery Academy</i>	63
	Bidan/ <i>Midwife</i>	-
	SPK/SPR	42
	Pekarya Kesehatan SLTA/SLTP	86
3	Paramedis Non Perawatan/ <i>Paramedics</i>	142
4	Tenaga Non Medis/ <i>Non Medical Personnels</i>	359
	Jumlah/ <i>Total</i>	1349

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

- **Fasilitas Kesehatan (Kesehatan Ibu dan Anak)**

Persentase terbesar kelima pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dianggap berdampak secara langsung terhadap variable kemiskinan adalah subvariabel fasilitas kesehatan yang dilaksanakan dalam program kesehatan ibu dan anak berupa penekanan angka kematian masyarakat (ibu dan anak) sebesar 0,354%.

Angka Gizi Buruk

Persentase terbesar keenam pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dianggap berdampak secara langsung terhadap variable kemiskinan adalah subvariabel angka gizi buruk yang dilaksanakan dalam program perbaikan gizi masyarakat sebesar 0,1354%.

Akses Air Bersih

Persentase terkecil pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dianggap berdampak secara langsung terhadap variable kemiskinan adalah subvariabel akses air bersih yang dilaksanakan dalam program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sebesar 0,0586%.

Tabel 7
Jumlah Keadaan Gizi Balita menurut Status dan Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Puskesmas	Ditimbang	Gizi Lebih	Gizi Baik	Gizi Kurang	Mal-nutrisi
1	Balaraja	Balaraja	6 322	57	6 000	236	265
		Gembong	4 667	107	4 227	309	333
2	Jayanti	Jayanti	4 654	24	4 403	184	227
3	Tigaraksa	Tigaraksa	5 584	20	5 345	198	219
		Pasir Nangka	8 873	27	8 755	86	91
4	Jambe	Jambe	4 676	8	4 367	56	75
5	Cisoka	Cisoka	8 613	24	8 176	378	413
6	Kresek	Kresek	5 080	3	4 948	91	129
7	Kronjo	Kronjo	4 423	16	4 157	224	250
8	Mauk	Mauk	6 631	46	6 250	299	335
9	Kemiri	Kemiri	3 581	26	3 345	182	210
10	Sukadiri	Sukadiri	4 540	13	4 300	215	227
11	Rajeg	Rajeg	7 900	107	7 418	328	375
		Sukatani	6 089	6	5 978	85	105
12	Pasar Kemis	Kutabumi	31 302	74	30 801	408	427
13	Teluknaga	Teluknaga	8 087	40	7 662	314	385
		Tegal Angus	3 165	6	2 653	427	506
14	Kosambi	Kosambi	7 656	69	7 110	446	477
		Salemban Jaya	6 569	13	5 977	538	579
15	Pakuhaji	Pakuhaji	5 007	26	4 669	265	312
		Sukawali	4 014	3	3 740	227	271
16	Sepatan	Sepatan	11 489	-	11 469	10	20
17	Curug	Curug	10 269	7	10 169	89	146
		Binong	4 425	17	4 369	30	39
18.	Cikupa	Cikupa	16 720	123	16 366	199	231
		Pasir Jaya	8 179	32	8 066	65	81
19.	Panongan	Panongan	11 587	182	10 984	406	421
20.	Legok	Legok	5 363	5	5 249	89	109
		Bojong Kamal	1 635	-	1 601	15	34
		Caringin	1 215	124	1 036	45	55
21.	Pagedangan	Pagedangan	11 158	36	10 871	216	251
22.	Cisauk	Cisauk	2 286	32	2 108	126	146
		Suradita	3 611	16	3 408	158	187
23.	Sukamulya	Sukamulya	5 866	7	5 773	76	86
24.	Kelapa Dua	Kelapa Dua	3 888	14	3 753	112	121
		Jl. Emas	778	474	301	3	3
		Jl. Kutai	3 187	15	3 120	43	52
		Bojong Nangka	6 024	168	5 741	100	115
25	Sindang Jaya	Sindang Jaya	6 445	141	5 969	312	335
26	Sepatan Timur	Kedaung Barat	7 277	30	6 955	260	292
Jumlah/Total			283 050	2 227	283 050	2 227	271 407

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 8

Jumlah Pelanggan Air Minum, Volume dan Tagihan Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016

Golongan		Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Volume (M3)	Tagihan (Rp)
1.	B1	Niaga Kecil	5.839	1.215.642	9.408.382.700
	B2	Niaga Besar	455	284.718	2.162.142.600
	B3	Industri Kecil	11	5.591	49.018.300
	B4	Industri Besar	99	537.081	5.341.160.800
2.	R1	Rumah Tangga (RSS)	278	73.294	243.480.225
	R2	Rumah Tangga (RS)	49.330	11.318.808	45.780.928.200
	R3	Rumah Tangga (Menengah)	65.587	15.778.803	76.510.950.200
	R4	Rumah Tangga (Mewah)	12.479	2.708.249	16.060.905.550
	R5	Kantor Pemerintah	121	197.744	1.406.872.850
3.	S1	Sosial Murni	646	311.905	460.160.375
	S2	Sosial Komersial	518	896.056	1.715.628.500
4		Air Curah	34	102.977.759	289.905.388.297
Jumlah/Total			135.397	136.305.650	449.045.018.597

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap apasaja peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan, bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan telah direalisasikan ke dalam 25 program unggulan yang dilaksanakan secara konsisten yang bersifat lintas sektor dan lintas SKPD yang diharapkan dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Selain terdapat 25 program unggulan, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang juga telah mengentaskan kemiskinan dengan membenahi beberapa

hal terkait faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah seperti berupaya meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita Daerah Kabupaten Tangerang, meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, meningkatkan angka melek huruf, memperbaiki sarana dan prasarana akses air bersih dan akses fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

Meskipun peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan sudah cukup banyak, akan tetapi Pemerintah Daerah harus terus kreatif dan inovatif dalam mencari dan memecahkan berbagai masalah penyebab kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Dengan mulai menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun diharapkan mampu menjadi pemicu semangat Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk terus berbenah dan berkarya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang perlu membuka akses air bersih di daerah pesisir atau beberapa daerah kumuh yang saat ini sulit mendapat akses air bersih dan sanitasi. Hal ini dimaksudkan agar kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat. Pemda melalui PDAM dapat pembebasan biaya pemasangan pertama bahkan subsidi biaya iuran bulanan PDAM daerah sulit akses air bersih dan sanitasi buruk;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang perlu meningkatkan program posyandu di tiap desa guna menekan angka kematian ibu dan anak serta angka gizi buruk dengan meningkatkan kualitas tenaga medis dan paramedis di posyandu pada tiap desa wilayah Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi 1. Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro. Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mangkoesubroto. 2006. *Ekonomi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: CPEE UGM
- Marwansyah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Saleh, Samsubar. 2002. *Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres
- Stephen P.Robbins. 2009. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Todoro. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Jilid 1 & 2*. Jakarta: Erlangga.
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

WERBSITE INTERNET

<https://banten.bps.go.id>

<http://banten.bisnis.com/read/20160722/425/568393/program-pengentasan-kemiskinan-tidak-terintegrasi>

<http://bantenku.com/post/detail/laju-pertumbuhan-ekonomi-banten-turun-dalam-4-tahun-terakhir>

<http://www.bantenhits.com/rubrik-ekonomi-bisnis/43019>

<http://www.infonawacita.com/31-juta-kabupaten-tangerang-dibawah-garis-kemiskinan>

<https://tangerangkab.bps.go.id/>

<http://www.infonawacita.com>

www.jawapos.com

<http://www.jawapos.com/baca/artikel/19910/gebrak-pakumis-inovasi-bupati-tangerang-ahmed-zaki-iskandar-berantas-kemiskinan>